



HISTORIA VITAE

Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah

Volume 28, No. 1, April 2014

ISSN - 0215-8809

- ☐ **REVOLUSI BOLSHEVIKS**
Sutarjo Adisusilo, I.R.
- ☐ **KEWIRAUUSAHAAN KOTA GEDE MASA KOLONIAL: STUDI TENTANG
DAYA DUKUNG**
Anton Meryono
- ☐ **MENGGKRITISI SUMBER BELAJAR SEJARAH PERISTIWA 1965:
ANTARA KEPENTINGAN POLITIK DAN ILMIAH**
Hendra Kurniawan
- ☐ **STRATEGI PEMBELAJARAN SEJARAH PERISTIWA 1965 UNTUK
TINGKAT SMA**
Yulius Dwi Cahyono
- ☐ **PERKEMBANGAN MASALAH MORO 1975-1994**
A. Kardiyat Wiharyanto

Diterbitkan oleh :

Program Studi Pendidikan Sejarah – FKIP, Jurusan Ilmu Sejarah – Fakultas Sastra

Universitas Sanata Dharma

Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002

E-mail: spps@staff.usd.ac.id

PERKEMBANGAN MASALAH MORO 1975-1994

A. Kardiyat Wiharyanto

Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan beberapa permasalahan yaitu: (1) Munculnya perlawanan bangsa Moro, (2) Bangsa Moro yang semakin militan, (3) Upaya untuk melakukan berbagai perundingan, (4) Hasil perundingan di Tripoli dan di Jakarta. Metode penulisan makalah ini dengan metode sejarah yang mencakup empat langkah yaitu: pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan sejarah yang ditulis secara deskriptif analitis. Hasil penulisan menunjukkan bahwa: (1) Munculnya perlawanan Moro dimulai dengan upaya sosialisasi kemerdekaan Filipina di Filipina selatan. (2) Bangsa Moro di Filipina selatan bisa semakin militan karena mereka minta bantuan ke negara-negara Timur Tengah, terutama Libya masa Gadhafi. (3) Upaya untuk melakukan perundingan dilakukan karena jalan kekerasan yang dilakukan pemerintah selalu gagal. (4) Perundingan di Tripoli maupun di Jakarta menunjukkan bahwa Filipina selatan tetap di dalam koridor pemerintah Filipina, namun memiliki hak otonomi.

ABSTRACT

This paper aims to analyze some issues: (1) The emergence of resistance Moro nation, (2) The increasingly militant Moro nation, (3) The attempt to do the negotiations, (4) The results of the negotiations in Tripoli and in Jakarta. The method of this paper with the historical method includes four steps: collection of the source, source criticism, interpretation, and writing of history written in descriptive analysis. Writing results showed that: (1) Emergence of the Moro resistance begins with socialization efforts in the southern Philippines Philippine independence. (2) Moro in

southern Philippines could be more militant because they had recourse to Middle Eastern countries, particularly Libyan Gadhafi era. (3) Efforts to negotiate a path of violence because the government has always failed. (4) Talks in Tripoli as well as in the southern Philippines Jakarta showed that remain in the corridor of the Philippine government, however, has the right to autonomy.

Keywords: Moro, Filipina, Perundingan Tripoli, Perundingan Jakarta

MUNCULNYA PERLAWANAN MORO

Pada bagian ini, akan terlihat bagaimana awal munculnya perlawanan Moro. Masalah Moro sebagaimana diketahui dan disebut demikian oleh pemerintah dan bangsa secara umum, tidak lain kecuali masalah bagaimana mengintegrasikan penduduk Muslim Filipina ke dalam tubuh politik Filipina, dan masalah bagaimana menanamkan suatu pandangan bahwa mereka orang-orang Filipina dan pemerintah ini adalah pemerintah mereka dan mereka bagian darinya. Pemerintah Filipina telah gagal menanamkan arti Filipina yang benar ke dalam pikiran mereka, terbukti mereka tidak terintegrasi, tetapi justru memberontak.

Semula pemerintah Filipina yakin bahwa gerakan Moro dapat dipadamkan dengan kekerasan. Namun gerakan tersebut terus dapat bertahan, walaupun kekuatan mereka makin berkurang. Tampaknya pemerintah Filipina kesulitan juga dalam mengatasi masalah Moro itu. Filipina merupakan salah satu negara anggota ASEAN, berpenduduk 47 juta jiwa (1993) yang tersebar pada 7.107 buah pulau yang menggunakan dialek bahasa yang berbeda-beda, yang mencerminkan banyaknya suku dan komunitas etnis (From Secession to Autonomy, 1980:2). Seperti negara-negara lainnya di Asia Tenggara, Filipina juga memiliki kekhasan dengan berbagai masalahnya. Satu hal yang membedakan Filipina dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya, adalah bahwa penduduk mayoritas Filipina beragama Katolik, selebihnya beragama Kristen dan Islam. Keadaan itu menimbulkan konflik dan masalah-masalah di dalam negeri, khususnya masalah orang-orang Islam.

Orang-orang Islam di Filipina ini menamakan diri mereka Moro.

Perkembangan Masalah Moro.... (A. Kardiyat Wiharyanto)

Namun nama itu sebenarnya lebih bersifat politis, karena dalam kenyataannya Moro terdiri dari banyak kelompok etnolinguistik. Sedangkan jumlah keseluruhan masyarakat Moro itu sekitar 4,5 juta jiwa atau 9 % dari seluruh penduduk Filipina (Michael O. Mastura, 1984:178).

Mayoritas orang-orang Moro adalah nelayan dan petani. Namun ada juga orang-orang Islam yang bekerja di sektor pemerintahan sebagai guru, administratur, personil angkatan bersenjata, pegawai kantor kehakiman dan bahkan ada pula yang terpilih sebagai gubernur. Kaum Muslim yang mendapat pendidikan sekular cenderung mudah menyatu dengan negara Filipina. Sebaliknya, mereka yang tidak mau menerima pendidikan sekular dan hanya mendapatkan pendidikan agama secara tradisional, biasanya tidak menghendaki integrasi dengan Filipina, terutama kelompok elit lokal yang mendapat pendidikan di Timur Tengah.

Identifikasi dan kesadaran etnik yang terjadi karena pembagian komunitas-komunitas Muslim secara geografis, tampaknya sangat kuat. Namun, meskipun terdapat variasi dan perbedaan itu, terdapat perasaan persaudaraan keagamaan terutama ketika menghadapi persoalan yang sama (Saiful Muzani, 1993:47). Bagi orang Moro, Islam merupakan identitas nasionalnya (Albert Rovenholt, 1962:146).

Bukan hanya agama yang telah menyatukan orang-orang Muslim. Kesulitan ekonomi dan kerasnya hidup yang dialami kaum Muslim di wilayah Selatan membuat mereka merasa mendapat ikatan nasib yang sama. Kebijakan untuk menempatkan orang-orang Kristen di Mindanao beberapa dekade lalu, sejak berakhirnya PD II membuat keseimbangan tradisional di wilayah itu terganggu, dan merugikan masyarakat Muslim. Masuknya modal dan teknologi secara besar-besaran ke wilayah Mindanao di berbagai kegiatan ekonomi, yang dalam beberapa kasus mengakibatkan tersingkirnya masyarakat Muslim dari tempat tinggal tradisional mereka, sangat tidak menguntungkan masyarakat Muslim tersebut. Pembentukan kelompok bersenjata di kalangan Muslim di Filipina Selatan, harus dilihat dalam konteks meningkatnya frustrasi di kalangan mereka, sehingga berkembang menjadi konflik bersenjata.

Gerakan bersenjata Moro sebenarnya telah berlangsung sejak

jaman kekuasaan Spanyol (D.G.E. Hall, 1966:248). Benih kebencian yang telah bertabur rupanya tidak hilang melalui perjalanan waktu, bahkan makin bertambah saja. Kurangnya kesadaran sejarah, telah menyebabkan kaum Moro itu tidak mampu mencari jalan keluar dari kemunduran yang telah lama mereka derita (Badri Yatim, 1985:130), sebaliknya orang Filipina yang lain terus maju. Faktor kecemburuan sosial tersebut, tidak kalah pentingnya menjadi angin yang mengipasi permusuhan mereka sehingga sulit untuk diselesaikan.

Sejak jaman kekuasaan Spanyol daerah Filipina Selatan itu memang kurang diperhatikan. Hal ini disebabkan, karena pada jaman kolonial Spanyol daerah Filipina Selatan itu tidak aman. Dengan demikian jelaslah bahwa pada jaman penjajahan, tujuan gerakan Moro ini pada mulanya juga merupakan gerakan penuntut adanya suatu kebebasan dari penetrasi Spanyol. Mereka ingin tetap hidup merdeka, bebas melakukan ibadat dan tatacara sesuai dengan agama mereka. Untuk itu berbagai cara mereka lakukan tujuan mereka dapat dicapai. Berdasarkan pengalaman, bila masalah tidak segera terselesaikan bahkan hingga berkepanjangan, maka tujuannya pun bisa berkembang.

Wilayah masyarakat Muslim di Selatan baru bisa bersatu secara bertahap dengan rakyat Filipina lainnya setelah negara itu diduduki Amerika Serikat di awal abad ini. Pada jaman kekuasaan Amerika Serikat itu pula kaum Muslim kehilangan kontrol atas wilayah Filipina Selatan, tak ubahnya seperti orang Indian di Amerika (David Joel Steinberg, 1990:88). Namun demikian, Amerika Serikat gagal menyamakan masyarakat ini di bidang sosial, budaya, dan pendidikan dengan masyarakat Filipina lainnya (Saiful Muzani, 1993:35).

Dalam masa Perang Dunia II, Amerika berhasil mengajak orang-orang Moro berjuang bersama dengan orang-orang Filipina yang lain. Mereka bersama-sama diorganisir dalam satu pasukan gerilya oleh Amerika guna menghadapi serangan Pasukan Jepang. Dalam suasana seperti itu mereka yang berasal dari berbagai latar belakang agama, seperti Katolik, Islam, Kristen dan agama asli Filipina, tidak mempermasalahkan asal mereka. Semua gerilya dipersatukan oleh patriotisme dan perasaan nasionalisme yang kian tebal.

Perkembangan Masalah Moro.... (A. Kardiyat Wiharyanto)

Sesudah Filipina merdeka, ternyata persatuan dan kesatuan antar golongan itu merenggang, sehingga gerakan separatis Moro muncul kembali. Perdagangan kiranya juga menjadi faktor penting bagi perkembangan gerakan separatis Moro itu. Sebagaimana kita ketahui, bahwa kegiatan orang-orang Muslim sewaktu berdagang di Asia Tenggara, salah satunya adalah berdagang. Hal ini tidak berbeda jauh dengan Spanyol yang salah satu tujuannya juga adalah berdagang. Dalam urusan perdagangan ini, orang-orang di Moro lebih suka melakukan relasi dengan orang-orang di Malaya daripada dengan orang-orang Filipina lainnya. Ternyata relasi tersebut akhirnya mengalami perkembangan juga, yaitu tidak hanya terbatas pada perdagangan tetapi juga soal politik.

Sewaktu Macapagal menjabat Presiden, pemerintahnya melancarkan klaim atas Sabah. Pemerintah Filipina melakukan hal ini, karena kecurigaannya terhadap Sabah, sebagai pintu masuk senjata-senjata dan tempat latihan bagi kelompok pemberontak Moro dari Mindanao. Karena itu dengan alasan bahwa Sabah menurut peta masih termasuk wilayah Filipina, maka Macapagal menyatakan bahwa Sabah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Filipina (D.G.E. Hall, 1966:286). Tindakan Presiden Macapagal ini pada akhirnya semakin menambah persoalan lagi. Salah satu persoalan pokok dalam masalah politik di Filipina saat itu adalah perlunya pimpinan nasional yang kuat (Onofil D. Corpus, 1965:139).

Presiden Marcos sebagai pengganti Macapagal, dinilai sebagai figur yang kuat untuk memecahkan masalah Moro. Hal itu terbukti Marcos segera berusaha memecahkan masalah Moro dengan kekuatan senjata (Keith Lightfoot, 1973:193). Keadaan tersebut mengundang perhatian negara-negara lain, seperti Libya, dan negara-negara ASEAN.

Mengingat bahwa masalah Moro itu sampai pertengahan tahun 1994 belum dapat diselesaikan dengan tuntas, maka ada kecenderungan bahwa perlawanan Moro bisa bertahan lama. Perlawanan seperti itu memang tidak dikehendaki oleh orang-orang Moro sendiri, andaikan hak dan kedudukan mereka diperhatikan oleh pemerintah pusat. Sebaliknya pemerintah pusat juga tidak senang terhadap gerakan tersebut.

MILITANSI GERAKAN MORO

Kerangka perjuangan orang Moro ternyata telah memunculkan dimensi lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Filipina. Orang-orang Moro lebih menginginkan sebagai orang Muslim daripada sebagai orang Filipina. Hal inilah yang menyebabkan orang Moro sulit melakukan kompromi dengan pemerintah.

Dalam kalangan orang-orang Moro, Islam menjadi ikatan mereka, sebab Islam juga sudah merupakan ikatan pemersatu di dalam masyarakat Muslim di Asia Tenggara (Taufiq Abdullah, 1976). Dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak membedakan antara hukum dan adat. Banyak hukum dikesampingkan karena dianggap kontradiksi dengan adat yang berlaku. Hal ini yang menyebabkan kesetiaan kepada pemerintah lemah (Azyumardi Azra, 1989:150).

Pemerintah Filipina menilai bahwa sikap orang-orang Moro tersebut jika dibiarkan akan memecah belah Filipina. Karena itu para pemimpin negeri itu terus menerus berusaha untuk menyelesaikan masalah Moro itu. Agar masalah Moro tidak meluas, Marcos pernah memanggil para pemuka agama ke Malacanang. Di samping itu, ia juga melakukan peninjauan langsung ke daerah pertikaian. Konflik bersenjata bisa dihindarkan, tetapi tidak berlangsung lama, sebab tak lama kemudian berkobar perang. Itulah sebabnya Malaysia, Libya dan Kuwait menuduh Marcos membantai penduduk Muslim di Filipina Selatan, serta minta kepada PBB untuk bertindak.

Dalam perkembangannya kelompok-kelompok bersenjata Moro meningkatkan serangannya terhadap kesatuan-kesatuan tentara di Filipina Selatan, sehingga banyak tentara pemerintah yang menjadi korban. Peristiwa itu membangkitkan kemarahan pihak militer Filipina, sehingga pasukan-pasukan dalam jumlah besar dikirim ke daerah tersebut.

Peningkatan jumlah tentara Pemerintah di Filipina Selatan untuk sementara waktu dapat meredakan konflik. Namun demikian situasi di Filipina Selatan dapat dikatakan tidak perang dan tidak damai. Dengan demikian suasana damai di wilayah itu hanya semu saja. Berbagai desas-desus mulai beredar dan situasi bisa menjadi panas.

Pada bulan Oktober 1972 meletus pemberontakan yang lebih kuat.

Perkembangan Masalah Moro.... (A. Kardiyat Wiharyanto)

Tentara pemberontak mengambil alih pemancar radio pemerintah di Mindanao. Serangan tersebut nampaknya dipersiapkan lebih rinci, terbukti sasarannya dipilih dengan baik dan waktu serangan juga ditetapkan melalui perencanaan yang matang. Serangan itu juga berhasil merebut kota Marawi, tetapi hanya dapat dipertahankan selama dua hari.

Gerakan Moro menyadari bahwa tanpa bantuan asing tidak mungkin bisa bertahan melawan tentara pemerintah. Untuk menyerap dana dari luar MNLF mendirikan perwakilan di berbagai negara Islam dan melakukan propaganda yang menunjukkan penindasan pemerintah Filipina terhadap penduduk Islam.

Negara yang pertama memberikan bantuan dana adalah Libya, yang memberi bantuan tak terbatas. Dengan bantuan yang tak terbatas itu gerakan Moro semakin bisa melengkapi diri dengan senjata-senjata mutakhir. Senjata-senjata tersebut diselundupkan lewat Sabah atau Brunei. Untuk menghadapi gerakan Moro yang militan karena fanatisme golongan dan didukung dana asing itu, Filipina meminta bantuan senjata dari Amerika. Namun sikap Amerika tidak sebaik sewaktu Filipina minta bantuan senjata untuk menumpas pemberontakan komunis. Itulah sebabnya, Filipina juga minta bantuan ke negara-negara Eropa.

Undang-undang Darurat yang diumumkan tahun 1972 juga kurang efektif untuk menumpas pemberontakan Moro, tetapi justru menambah lawan. Hal ini disebabkan karena pengeblosan ke penjara tanpa proses. Dalam waktu lima tahun saja ada 60.000 orang yang dipenjarakan, termasuk para rohaniwan Kristen (M. Imam Azis dkk., 1993:138).

Pihak Moro yang mempunyai pijakan yang cukup kuat di Mindanao, menghadapi serangan pemerintah dengan gigih. Karena itu dalam memasuki tahun 1973 perlawanan bersenjata meningkat (Richard J. Kessler, 1986:53). Akhirnya Marcos menyadari bahwa perang yang dilakukan akan berjalan lama dan banyak menghabiskan biaya. Di samping itu, jumlah korban, baik tentara maupun rakyat sudah cukup banyak. Menyadari akan hal tersebut, Marcos memilih alternatif politik untuk memecahkan masalah Moro itu.

UPAYA LEWAT PERUNDINGAN-PERUNDINGAN

Dalam rangka menempuh jalur diplomasi, Marcos mengirimkan utusannya ke Jeddah untuk mengadakan perundingan pendahuluan agar bisa ditemukan jalan yang bisa diterima kedua pihak. Sementara itu gerakan separatis Moro pimpinan Nur Misauri menerima ajakan pemerintah untuk berunding. Ketentuan yang diminta, yakni tempat perundingan diselenggarakan di luar wilayah Filipina. Nur Misauri menunjuk tempatnya di Jeddah, Saudi Arabia.

Sementara itu negara-negara ASEAN, terutama Indonesia, juga menawarkan alternatif-alternatif penyelesaian masalah Moro. Berdasarkan pengalaman Indonesia, konflik semacam masalah Moro itu dapat ditempuh dengan cara menanamkan pengertian di antara pemeluk agama dan aliran (Rafael Steingerg, 1987:28).

Bagaimanapun juga pergoalakan gerakan separatis Moro tidak cukup dipandang sebagai pemberontakan, karena kaum Muslim Filipina menganggap sebagai persoalan prinsipil, maka pemecahannya harus pula dilakukan secara prinsipil (Sudibyo, 1978: 286). Itulah sebabnya Organisasi Konferensi Islam mendesak kepada pemerintah Manila agar mengakui hak minoritas Islam Filipina.

Setelah dilakukan beberapa pendekatan, akhirnya pemerintah Manila menerima ajakan Nur Misauri untuk bertemu di Jeddah. Pada tanggal 16 Januari 1975 berlangsunglah perundingan antara pemerintah dengan gerakam Moro atau MNLF (Moro Nationalist Liberation Front) di Jeddah. Delegasi pemerintah Filipina dipimpin Aljendro Melchor Jr. Karena MNLF menuntut pembentukan suatu negara otonom, lengkap dengan angkatan perangnya sendiri, maka akhirnya perundingan itu gagal (Sudibyo, 1978:287). Marcos berpegang pada prinsip bahwa di dalam negara tidak boleh ada negara lagi. Karena itu ia tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan.

Walaupun di satu sisi banyak tentara yang menyerah, tetapi di sisi lain serangan gerilya Muslim tidak mereda, tetapi justru semakin meningkat. Serangan tersebut mengakibatkan meningkatnya jumlah korban, baik dari pihak pemerintah maupun dari pasukan Muslim. Pertempuran yang hebat berkobar di propinsi Lanao Sur, pada tanggal 9

Perkembangan Masalah Moro.... (A. Kardiyat Wiharyanto)

Maret 1976 (Rafael Steinberg, 1987:396).

Untuk mengakhiri kekerasan senjata tersebut, maka pada tanggal 23 Desember 1976 Perjanjian Tripoli berhasil ditandatangani. Perjanjian Tripoli sendiri merupakan kesepakatan mengikat yang ditandatangani oleh wakil pemerintah Filipina semasa Presiden Marcos, Carmelo Z. Barbero, dengan pemimpin MNLF, Nur Misauri. Isi perjanjian itu pada intinya adalah pembentukan suatu otonomi bagi kaum Muslim di Filipina Selatan di dalam wilayah kedaulatan dan integritas Republik Filipina.

Jika dilihat secara keseluruhan, Perjanjian Tripoli sendiri terdiri dari beberapa bagian. Pertama adalah pernyataan mengenai pembentukan suatu otonomi di Filipina Selatan dalam wilayah kedaulatan dan integritas teritorial Republik Filipina. Kedua adalah wilayah-wilayah otonomi bagi kaum Muslim di Filipina Selatan terdiri dari 13 propinsi: Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboaga del Sur, Zamboaga del Norte, North Cotabato, Maguindanao, Sultan Kudarat, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Davao del Sur, South Cotabato dan Palawan, yang kalau ditotal kira-kira mencapai sepertiga dari seluruh wilayah Filipina.

Bagian ketiga terdiri dari enambelas butir, antara lain menyangkut masalah pertahanan nasional, pendidikan, sistem administrasi, sistem ekonomi dan keuangan, pasukan keamanan daerah, perwakilan di pemerintahan nasional, majelis legislatif dan dewan eksekutif, dan pertambangan dan mineral.

Mengenai masalah pertahanan keamanan, Perjanjian Tripoli menyebutkan bahwa masalah pertahanan merupakan urusan Pemerintah Pusat sedangkan pengaturan bagi penggabungan pasukan-pasukan MNLF ke dalam AB Filipina dibahas kemudian. Mengenai masalah pendidikan disebutkan pemerintah otonom Filipina Selatan harus mempunyai hak untuk membangun sekolah, akademi dan universitas.

Kaum Muslim harus mempunyai sistem administrasi mereka sendiri berkaitan dengan tujuan otonomi dan lembaga-lembaganya. Pemerintah otonomi harus mempunyai wakil dan berpartisipasi di pemerintah pusat, berapa besarnya akan dibahas kemudian. Perlunya pasukan keamanan khusus daerah (semacam polisi) di wilayah otonomi

Muslim di Filipina Selatan.

Sebuah Majelis Legislatif dan Dewan Eksekutif harus dibentuk di wilayah otonomi Muslim. Pembentukan Majelis Legislatif harus melalui pemilu langsung dan pembentukan Dewan Eksekutif berdasarkan penunjukan majelis. Dan masalah menyangkut mineral dan pertambangan merupakan kompetensi pemerintah pusat dan ada suatu pembagian pendapatan untuk wilayah otonomi berdasarkan persentase yang masuk akal.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan isi Perjanjian Tripoli itu sulit dilakukan. Sebab, perinciannya tidak pernah tuntas dibuat dan malah ada upaya-upaya dari pemerintah di Manila, untuk melaksanakan secara unilateral bagian-bagian dari perjanjian, selain adanya campur tangan pihak luar. Misalnya saja, Presiden Marcos secara sepihak menyelenggarakan referendum sendiri pada tanggal 17 April 1977, yang hasilnya empat propinsi memilih tidak ikut dalam pemerintahan otonomi. Referendum itu menimbulkan reaksi dari MNLF, Libya (pendukung MNLF) maupun Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Menurut Misuari bila hasil itu yang muncul tentu tak lepas dari upaya Manila melakukan rekayasa-rekayasa atau mencari celah-celah untuk kepentingannya sendiri. Karena itu ia memerintahkan para pengikutnya untuk memboikot referendum tersebut.

Marcos memang mengadakan referendum di Filipina Selatan itu berdasarkan penafsirannya sendiri pada salah satu butir dalam Perjanjian Tripoli yang menyebutkan: pemerintah Filipina harus melakukan seluruh proses konstitusional untuk penerapan seluruh perjanjian itu. Padahal isu ini merupakan penghambat utama implementasi otonomi itu. Sebab pemerintah di Manila menghendaki otonomi itu diberikan lewat cara-cara konstitusional seperti referendum, sedangkan pihak MNLF menghendaki otonomi itu diserahkan begitu saja oleh pemerintah.

Bahkan setelah Perjanjian Tripoli itu, Marcos pernah menawarkan kepada Misuari untuk menjabat menjadi Menteri Besar, namun tawaran itu ditolak karena tak sesuai dengan Perjanjian Tripoli. Menurut Misuari, tawaran itu diberikan tanpa suatu konsultasi dengan pihak MNLF, mupun para pemimpin dan rakyat Moro. Dengan demikian ia berkesimpulan

Perkembangan Masalah Moro.... (A. Kardiyat Wiharyanto)

bahwa Marcos akan membuatnya sebagai boneka yang harus tunduk kepada Manila.

Sejak itu upaya-upaya perundingan senantiasa gagal karena kecurigaan mendalam pada kedua belah pihak. Manila menuduh keterlibatan Libya sebagai intervensi asing dalam masalah internal negaranya dan MNLF sama sekali dikendalikan oleh Tripoli. Sedangkan pihak MNLF menuduh Marcos tidak bisa dipercaya karena berusaha memasuki perjanjian tanpa bermaksud mematuhinya dan hanya bermaksud memanfaatkan perundingan untuk mendapatkan kemenangan di medan pertempuran. Sejak itulah MNLF memutuskan untuk menjauhi perundingan sampai ada kondisi-kondisi baru yang memungkinkan. Pada masa itulah konflik di Filipina Selatan memuncak kembali, ketika hampir dua pertiga dari unit-unit tempur pemerintah dikerahkan untuk menumpas perlawanan Moro. Pemerintah dapat menguasai sebagian besar wilayah Selatan, namun tidak berhasil memadamkan perlawanan kaum Moro.

Sementara itu kelompok-kelompok bersenjata Moro telah melakukan persiapan yang lebih matang untuk membuka konfrontasi baru melawan pemerintah. Disamping itu, kelompok bersenjata Moro juga sudah menyiapkan pasukan cadangan dari kaum muda Muslim yang sudah terlatih pula. Apabila pada tahun 1986 pemerintah Marcos tidak runtuh, perang besar akan meletus di Filipina.

DARI TRIPOLI MENUJU KE JAKARTA

Pengganti Presiden Marcos, adalah Corazon Aquino. Pemunculan presiden wanita pertama di Filipina ini agaknya lebih diharapkan oleh golongan Islam untuk memperhatikan kepentingan otonomi mereka. Benigno Aquino semasa hidupnya dikenal membina hubungan yang baik dengan para pemimpin Islam sehingga diharapkan bahwa istrinya paling tidak mempunyai pandangan yang sama dengan suaminya. Setidak-tidaknya Cory Aquino akan cukup lapang dada untuk lebih melaksanakan Persetujuan Tripoli 1976 tanpa ada motif politik yang merugikan masyarakat golongan Islam. Harapan-harapan tersebut membuat gerakan Moro menunggu dan melihat tindakan Cory selanjutnya.

Cory Aquino sendiri memang berjanji untuk menangani masalah Moro secara lebih proporsional dan memperhatikan kepentingan masyarakat golongan Islam yang mengharapkan otonomi penuh. Hanya beberapa hari setelah pelantikannya, ia mengirim utusan ke Malaysia untuk berbicara dengan tokoh-tokoh Moro tentang masalah mereka.

Pemerintahan Corazon Aquino, setelah revolusi People Power yang menumbangkan Marcos tahun 1986, memberikan otonomi kepada bangsa Moro di Filipina Selatan, di mana hal itu tercantum dalam UUD tahun 1987, sekaligus meminta kepada Misuari untuk kembali ke Filipina dari pengasingannya di timur Tengah. Namun sejauh itu rincian tentang otonomi di Mindanao tersebut tetap belum ada. Bagaimanapun moderatnya, Cory Aquino tidak dapat menerima berdirinya suatu negara Moro tersendiri (Kustigar Nadaek dan Atmadji, 1986:191), sebaliknya gerakan Moro terus menuntut otonomi penuh. Itulah sebabnya pendekatan yang dilakukan Cory Aquino mengalami jalan buntu.

Setelah kebuntuan-kebuntuan itu, di mana perlawanan kaum Moro terus berlangsung meski makin melemah, dan pemerintah Filipina juga terus melancarkan operasi-operasi untuk menumpas perlawanan kaum militan, akhirnya pemerintah Filipina di bawah Presiden Ramos mengambil inisiatif menghidupkan kembali perundingan dengan MNLF untuk mencari suatu penyelesaian politik.

Bagi pemerintah Manila perdamaian di Filipina Selatan memang amat penting. Negara itu memerlukan stabilitas politik dan keamanan kalau mau berhasil menjalankan pembangunan ekonominya. Ramos menghadapi kesulitan ekonomi yang cukup parah, sehingga tidak mungkin menghamburkan uang untuk melancarkan operasi militer di Filipina Selatan. Di sisi lain proyek-proyek ASEAN untuk mengadakan segitiga pertumbuhan Manado, Davao, Sabah tidak mungkin terlaksana bila situasi di sana belum damai. Dan yang terpenting adalah adanya kesadaran pemerintah Ramos bahwa yang paling menderita akibat perang dan kekacauan adalah rakyat jelata, yang sebenarnya menginginkan ketentraman dalam hidup mereka.

Bagi MNLF perdamaian juga tampaknya tidak terelakkan. Perjuangan bersenjata yang mereka lancarkan, terbukti tidak

Perkembangan Masalah Moro.... (A. Kardiyat Wiharyanto)

menghasilkan apa-apa bagi rakyat mereka kecuali penderitaan dan kehancuran. Sementara itu bantuan-bantuan dari luar negeri makin sulit didapat. Libya, misalnya, yang selama itu menjadi penyokong utama MNLF juga tengah mengalami masalah akibat embargo internasional. Kemudian perubahan situasi dunia pasca Perang Dingin juga makin mempersulit MNLF mendapatkan bantuan dari luar negeri. Dampak dari sulitnya mendapatkan dukungan itu adalah rusaknya disiplin para pejuang Moro, yang akhirnya banyak dari antara mereka menjalankan aksi kriminal.

Dua kali pembicaraan penjangjangan (*informal meeting*) di Tripoli, Libya, Oktober 1992, dan di Istana Presiden Cipanas, Jawa Barat, April 1993, memperlihatkan adanya kesungguhan pada kedua belah pihak untuk mencapai kemajuan-kemajuan ke arah penyelesaian konflik di Filipina Selatan. Pembicaraan di Cipanas, menyepakati beberapa hal penting yakni: akan diselenggarakan di tempat yang disepakati (kemudian yang disetujui adalah Jakarta); agenda pada pembicaraan formal mendatang berfokus pada modalitas untuk penerapan penuh Perjanjian Tripoli 1976, termasuk pokok-pokok dalam perjanjian itu yang akan dibicarakan pada perundingan berikutnya, dan struktur dan mekanisme transisi untuk implementasi perjanjian tersebut.

Pembicaraan formal pertama diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 23 oktober 1993. Hasil konkrit dari pertemuan formal ini adalah disepakatinya pembentukan delapan kelompok kerja (Pokja) yang akan membahas dan membuat laporan atas usulan-usulan yang diajukan dalam pembicaraan tersebut. Delapan Pokja itu dibentuk berdasarkan delapan pokok masalah yang diajukan oleh Sekretariat Bersama yang dibentuk pada hari pertama persidangan, dan disepakati.

Berdasarkan Perjanjian Tripoli 1976, Pokja itu disebut dengan *mixed committee*, yang terdiri dari wakil pemerintah Filipina dan MNLF, dengan tugas mempelajari butir-butir yang belum dibahas itu guna mencari penyelesaian dan kompromi. Pokja ini terdiri dari tiga atau empat orang dari masing-masing pihak dan mereka akan bekerja di Filipina selama waktu 80 hari, dan hasil kerja mereka harus dilaporkan kepada forum pertemuan formal berikutnya.

Bagaimanapun juga hasil pertemuan formal pertama di Jakarta itu masih jauh dari apa yang dinamakan suatu penyelesaian menyeluruh. Karena masalah-masalah yang dihadapi memang pelik. Misalnya, bagaimana mengintegrasikan gerilyawan MNLF, yang jumlahnya mencapai 15.000 orang ke dalam AB Filipina, yang selama ini sudah punya pola perekrutan dan pendidikan yang jelas. Atau berapa banyak wakil-wakil daerah otonom akan duduk dalam birokrasi pemerintah pusat. Kemudian cara-cara penyelenggaraan pemilu, dan lain-lain.

Boleh dikata, meski banyak kemajuan yang dicapai pada perundingan akhir tahun 1993 itu, tetap saja apa yang dicapai itu masih merupakan awal dari suatu pekerjaan besar yang harus dituntaskan kedua pihak dengan ikhtikad baik, ketulusan dan kejujuran demi mengangkat penderitaan maupun keterbelakangan di Filipina Selatan.

Karena itu menarik bila kita meneliti pernyataan ketua delegasi pemerintah Manuel T. Yan, bahwa pihaknya diutus Presiden Fidel Ramos untuk maju sejauh mungkin ke arah perdamaian. Demikian pula pernyataan Nur Misuari bahwa tugas mereka semua untuk mengkonsolidasikan perdamaian, meski di pihaknya tidak mau setuju begitu saja asal berdamai. MNLF juga berusaha agar perdamaian yang dicita-citakan harus diperoleh dengan terhormat dan bermartabat, serta sesuai dengan hak-hak dasar rakyat.

Berkat bantuan pihak Indonesia, mulai November 1993 berlangsung gencatan senjata antara kedua belah pihak, setelah lebih dari 20 tahun saling bertempur (Suara Merdeka, 4 September 1994). Kondisi tersebut memberi peluang kedua belah pihak untuk bertemu lagi.

Antara tanggal 31 Agustus sampai dengan 5 September 1994 berlangsung pertemuan formal kedua di Jakarta. Kedua belah pihak tetap mempertahankan pendiriannya masing-masing, sehingga samapi perundingan tersebut ditutup, mereka hanya dapat meninggalkan "pekerjaan rumah" yang harus ditindaklanjuti, yakni: masalah pertahanan dan keamanan tingkat regional, dan bagaimana mengimplementasikan semua hasil perundingan secara efektif. Yang menggembirakan, disepakati masalah pengiriman tim peninjau gencatan senjata di daerah otonomi Moro di Filipina Selatan (Suara Merdeka, 6 September 1994).

Perkembangan Masalah Moro.... (A. Kardiyat Wiharyanto)

Betapa jauhnya jalan yang menyeluruh, setidaknya perundingan ini memberikan secercah harapan bahwa kedua pihak berkehendak untuk mengakhiri kekejaman perang dan permusuhan selama ini yang hanya menimbulkan penderitaan, anarki, kehancuran dan keterbelakangan di kalangan rakyat. Dengan demikian masalah Moro di Mindanao memang amat sulit dan rumit. Karena itu kesalahan yang berakibat terjadinya berbagai bentrokan bersenjata di Filipina Selatan itu memang tidak bisa ditimpakan semata-mata kepada Ferdinand Marcos, sebab masalah Filipina Selatan merupakan warisan sejak orang-orang Spanyol menguasai daerah tersebut.

Sewaktu Filipina merdeka, pemerintahnya tidak sempat memperhatikan secara khusus daerah Filipina Selatan atau melihat problem yang dihadapi oleh golongan minoritas yang beragama Islam. Munculnya separatis Muslim di Filipina Selatan terbukti juga bukan semata-mata berlatar belakang agama, tetapi terutama kesenjangan sosial.

Di samping itu, lahirnya separatis Muslim di Filipina Selatan juga disebabkan perasaan kebangsaan Filipina yang amat rendah, karena terlampau terpukau kepada Amerika. Berbeda dengan Indonesia yang mempunyai rasa kebangsaan yang tumbuh sejak lama sejak jaman penjajahan Belanda dulu dan bisa menyebarkan ke seluruh pelosok tanah air. Karena adanya kelemahan-kelemahan tersebut, maka masalah Moro tidak bisa segera terselesaikan. Masalah itu akan selesai jika masing-masing pihak bisa mengalahkan "dirinya sendiri" atau mau kompromi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azyumardi Azra. 1989. *Perspektif Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Badri Yatim. 1985. *Sukarno, Islam dan Nasionalisme*. Jakarta: PT Inti Sarana Aksara.
- Corpus, Onofil D. 1965. *The Phillipines*. New Jersey: Englewood Cliff.
- From Secession to Autonomy: Self-Government in Southern Phillipines*. September 1980. Manila: Ministry of Foreign Affairs.

- Hall, D.G.E. 1966. *A History of South East Asia*. New York: St. Martin's Press.
- Imam Azis, M, dkk. 1993. *Agama, Demokrasi dan Keadilan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Keith Lightfoot. 1973. *The Philippines*. London: Ernest Benn Limited.
- Kessler, Richard, J. 1986. *Rebellion And Repression in The Philippines*. New Haven dan London: Yale University Press.
- Kustigar dan Atmadji. 1986. *Revolusi Damai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mastura, Michael O. 1984. *Muslim Filipino Experience: A Collection Essays*. Manila: Ministry of Muslim Affairs.
- Ravenhalf, Albert. 1962. *The Philippines*. New Jersey-Toronto-London- New York: Princeton.
- Saiful Muzani. 1993. *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Sudibyo. 1978. *Dokumentasi ASEAN Dalam Berita, Harapan dan Kenyataan*. Jakarta: PT Tira Pustaka.
- Steinberg, David Joel. 1990. *The Pilippines*. Boulder San Francisco and Oxford: Westview.
- Syeinberg, Rafael. 1987. *Kembali ke Filipina*. Jakarta: PT Tira Pustaka.
- Taufiq Abdullah. 1976. *Manusia dan Kebudayaan di Asia Tenggara (Islam di Asia Tenggara)*. Jakarta: Lembaga Kebudayaan Nasional-LIPI.
- Suara Merdeka*, 4 September 1994.
- Suara Merdeka*, 6 September 1994.